

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cet. II. UII Press: Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Cetakan Pertama. MIH Unihaz: Bengkulu.
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Djaja S. Meliala. 2012. *Penuntun Praktis: Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasiona Legal Reform Program: Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Visimedia: Jakarta.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana: Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- H.P.Panggabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*. Liberty: Yogyakarta.
- Habib Adjie. 2013. *Menjalin Pemikiran–Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2019. *Pemahaman terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- _____. 2019. *Mencermati: Masalah dan Solusi Kenotariatan*. Cetakan ke-II. Duta Nusindo Semarang: Semarang.
- _____. 2018. *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*. Cetakan ke-III. Duta Nusindo Semarang: Semarang.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kencana: Jakarta.
- Herlien Budiono. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- _____. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2018. *Demikian Akta ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Imam Gozali. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- J. Satrio. 2018. *Perwakilan dan Kuasa*. Rajawali Pers: Depok.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Pers: Jakarta.
- Lukman Santoso AZ. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.
- Munir Fuady. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cetakan ke II. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Mustofa. 2014. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. KaryaMedia: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Ke-XI. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rendy Saputra. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Ridwan H.R.. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus diambil Pengadilan*. FH Ull Press: Yogyakarta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju: Bandung.
- Sutan Remy Sjhadeini. 2019. *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok, dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Edisi Kedua. Cetakan I. Alumni: Bandung.
- Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Urip Santoso. 2017. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Kencana: Jakarta.
- Widodo Dwi Putro, et al. 2016. *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik: Perlindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobjek Tanah*. LelP: Jakarta.
- Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan XIV. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2019. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-II. Alumni: Bandung.

KARYA ILMIAH

- Enju Juanda. 2016. *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi; Volume 4 Nomor 1.
- Lidya Christina Wardhani. 2017. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Anshar. 2018. *Prinsip Kepatutan dalam Akta Kuasa untuk Menjual*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Nia Mardianto. 2012. *Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Riny Dwiyanti Manaroinsong. 2012. *Kedudukan Hukum Surat Kuasa Menjual terhadap Objek Jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Wandha Benny Bintoro. 2008. *Analisis Kemungkinan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi antara PT Telekomunikasi Seluler dan PT Natrindo Telepon Seluler*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

JURNAL

- Ahmad Syauqi. 2020. *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PDT/2012 tentang Pinjam Meminjam Uang dengan Surat Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 5 Nomor 2. Diakses di <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.
- Ayu Citraning Rahmawati. 2020. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan secara di Bawah Tangan*. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. Volume IV Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo.
- Bernadeta Resti Nurhayati. 2019. *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Komunikasi Hukum: Volume 5 Nomor 1. Fakultas Hukum dan Komunikasi: Universitas Katolik Soegijapranata. Diakses di <https://redirect.is/s8jk7sb> pada tanggal 17 Juni 2021. Pukul 23.22 Wita.
- Gede Dicka Prasmida, Yohanes Usfunan, I Made Udiana. 2017. *Kuasa Menjual Notariil sebagai Instrumen Pemenuhan Kewajiban Debitur yang*

Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang. Jurnal Acta Comitatus Universitas Udayana. Diakses dari: <https://bit.ly/31Wp0y8>, pada tanggal 17 Agustus 2020.

Irwan Adi Cahyadi. 2014. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses pada <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> (<https://cutt.ly/vjGfRWH>) pukul 22.58 Wita tanggal 21 Januari 2021.

Lidya Christina Wardhani, 2017, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017, Hal. 57.

Muhammad Eddo Afrian. 2016. *Kuasa Menjual sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Volume III No. 2. Oktober 2016.

Muhammad Noor, 2014, *Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Mazahab: Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, diakses di <https://redirect.is/z95sp7y> , pada 20.00 Wita, tanggal 19 Januari 2021.

Taufiq Utomo dkk. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicaput Sepihak Oleh Pemberi Kuasa*. Student Journal. Vol. 5 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang.

Sulasi Rongiyati. 2016. *Perjanjian Penjaminan Kredit Antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan*. Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1. DPR RI.

WEBSITE

Sandi Prisma Putra, 2020, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 dalam Perjanjian*, Sekolah Tinggi Hukum Garut, diakses di shorturl.at/ijpKU tanggal 1 Februari 2020 pada pukul 23.48 Wita.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Profil UU Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, DPR RI, diakses pada J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id), tanggal 10 Juni 2021 pada pukul 15.12 Wita.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

YURISPRUDENSI, PUTUSAN, DAN SURAT EDARAN

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 September 2002 Nomor 3641 K/PDT/2001.

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Juli 2014 Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Sgm

Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2015 Nomor 189/Pdt/G/2015/PN.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 211/Pdt.G/2017/PN.Cbi.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2015 Nomor 273/PDT/2015/ PT MKS.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Mei 2016 Nomor 119/PDT/2016/PT.SMG.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Februari 2019 Nomor 576/Pdt/2018/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 2016 Nomor 2597 K/Pdt/2016.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 2017 Nomor 3160 K/Pdt/2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.